



BERITA NEGARA REPUBLIK INDONESIA

No.473, 2009

KEMENTERIAN KEUANGAN.PBB. Alokasi
Biaya . Provisi. Kabupaten/Kota. Pemungutan.

**PERATURAN MENTERI KEUANGAN REPUBLIK INDONESIA
NOMOR 206/PMK.07/2009
TENTANG
PERKIRAAN ALOKASI BIAYA PEMUNGUTAN PAJAK BUMI
DAN BANGUNAN BAGIAN PROVINSI DAN KABUPATEN/KOTA
TAHUN ANGGARAN 2010**

DENGAN RAHMAT TUHAN YANG MAHA ESA

MENTERI KEUANGAN REPUBLIK INDONESIA,

- Menimbang** : bahwa dalam rangka melaksanakan ketentuan Pasal 5 ayat (1) dan ayat (3) Peraturan Pemerintah Nomor 16 Tahun 2000 tentang Pembagian Hasil Penerimaan Pajak Bumi dan Bangunan Antara Pemerintah Pusat dan Daerah dan ketentuan Pasal 9 Peraturan Pemerintah Nomor 55 Tahun 2005 tentang Dana Perimbangan, perlu menetapkan Peraturan Menteri Keuangan tentang Perkiraan Alokasi Biaya Pemungutan Pajak Bumi dan Bangunan Bagian Provinsi dan Kabupaten/Kota Tahun Anggaran 2010;
- Mengingat** : 1. Undang-Undang Nomor 12 Tahun 1985 tentang Pajak Bumi dan Bangunan (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 1985 Nomor 68, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 3312) sebagaimana telah diubah dengan Undang-Undang Nomor 12 Tahun 1994 (Lembaran Negara Republik

- Indonesia Tahun 1994 Nomor 62, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 3569);
2. Undang-Undang Nomor 32 Tahun 2004 tentang Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2004 Nomor 125, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4437) sebagaimana telah beberapa kali diubah terakhir dengan Undang-Undang Nomor 12 Tahun 2008 (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2008 Nomor 59, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4844);
 3. Undang-Undang Nomor 33 Tahun 2004 tentang Perimbangan Keuangan Antara Pemerintah Pusat dan Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2004 Nomor 126, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4438);
 4. Undang-Undang Nomor 47 Tahun 2009 tentang Anggaran Pendapatan dan Belanja Negara Republik Indonesia Tahun Anggaran 2010 (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2009 Nomor 156, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4575);
 5. Peraturan Pemerintah Nomor 16 Tahun 2000 tentang Pembagian Hasil Penerimaan Pajak Bumi dan Bangunan Antara Pemerintah Pusat dan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2000 Nomor 36);
 6. Peraturan Pemerintah Nomor 55 Tahun 2005 tentang Dana Perimbangan (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2005 Nomor 137, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4575);
 7. Keputusan Presiden Nomor 84/P Tahun 2009;
 8. Peraturan Menteri Keuangan Nomor 134/PMK.06/2005 tentang Pedoman Pembayaran Dalam Pelaksanaan Anggaran Pendapatan dan Belanja Negara;

MEMUTUSKAN:

Menetapkan : PERATURAN MENTERI KEUANGAN TENTANG PERKIRAAN ALOKASI BIAYA PEMUNGUTAN PAJAK BUMI DAN BANGUNAN BAGIAN PROVINSI DAN KABUPATEN/KOTA TAHUN ANGGARAN 2010.

Pasal 1

Dalam Peraturan Menteri Keuangan ini, yang dimaksud dengan:

- (1) Dana Bagi Hasil, yang selanjutnya disingkat DBH, adalah dana yang bersumber dari pendapatan Anggaran Pendapatan dan Belanja Negara yang dialokasikan kepada Daerah berdasarkan angka persentase untuk mendanai kebutuhan daerah dalam rangka pelaksanaan desentralisasi.
- (2) Pajak Bumi dan Bangunan, yang selanjutnya disebut PBB, adalah pajak yang dikenakan atas bumi dan bangunan.

Pasal 2

- (1) Penerimaan negara dari PBB dibagi dengan imbalan 10% (sepuluh persen) untuk Pemerintah Pusat dan 90% (sembilan puluh persen) untuk daerah.
- (2) DBH PBB sebesar 90% (sembilan puluh persen) dibagi dengan rincian sebagai berikut:
 - a. 16,2% (enam belas dua persepuluh persen) untuk provinsi yang bersangkutan;
 - b. 64,8% (enam puluh empat delapan persepuluh persen) untuk kabupaten/kota yang bersangkutan;
 - c. 9% (sembilan persen) untuk biaya pemungutan.

Pasal 3

- (1) Alokasi Biaya Pemungutan PBB bagian provinsi dan kabupaten/kota sebagaimana dimaksud dalam Pasal 2

ayat (2) huruf c untuk Tahun Anggaran 2010 merupakan perkiraan.

- (2) Perkiraan alokasi Biaya Pemungutan PBB bagian provinsi dan kabupaten/kota untuk Tahun Anggaran 2010 sebagaimana dimaksud pada ayat (1) didasarkan atas rencana penerimaan PBB sebagaimana ditetapkan dalam Undang-Undang Nomor 47 Tahun 2009 tentang Anggaran Pendapatan dan Belanja Negara Tahun Anggaran 2010.
- (3) Perkiraan alokasi Biaya Pemungutan PBB bagian provinsi dan kabupaten/kota untuk Tahun Anggaran 2010 sebagaimana dimaksud pada ayat (1) sebesar Rp1.115.326.349.738,00 (satu triliun seratus lima belas miliar tiga ratus dua puluh enam juta tiga ratus empat puluh sembilan ribu tujuh ratus tiga puluh delapan rupiah).
- (4) Perkiraan alokasi Biaya Pemungutan PBB bagian provinsi dan kabupaten/kota untuk Tahun Anggaran 2010 adalah sebagaimana ditetapkan dalam Lampiran yang tidak terpisahkan dari Peraturan Menteri Keuangan ini.

Pasal 4

- (1) Penyaluran Perkiraan alokasi Biaya Pemungutan PBB bagian provinsi dan kabupaten/kota dilakukan berdasarkan realisasi penerimaan PBB tahun anggaran berjalan.
- (2) Penyaluran Perkiraan alokasi Biaya Pemungutan PBB bagian provinsi dan kabupaten/kota dilaksanakan sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan.

Pasal 5

Peraturan Menteri Keuangan ini mulai berlaku pada tanggal diundangkan.

Agar setiap orang mengetahuinya, memerintahkan pengundangan Peraturan Menteri Keuangan ini dengan penempatannya dalam Berita Negara Republik Indonesia.

Ditetapkan di Jakarta
pada tanggal 4 Desember 2009

MENTERI KEUANGAN
REPUBLIK INDONESIA,

SRI MULYANI INDRAWATI

Diundangkan di Jakarta
pada tanggal 4 Desember 2009

MENTERI HUKUM DAN HAK ASASI MANUSIA
REPUBLIK INDONESIA,

PATRIALIS AKBAR

LAMPIRAN
PERATURAN MENTERI KEUANGAN REPUBLIK INDONESIA
NOMOR 209/PMK.07/2009 TENTANG PERKIRAAN ALOKASI
BIAYA PEMUNGUTAN PAJAK BUMI DAN BANGUNAN
BAGIAN PROVINSI DAN KABUPATEN/KOTA TAHUN
ANGGARAN 2010

**PERKIRAAN ALOKASI BIAYA PEMUNGUTAN PAJAK BUMI DAN BANGUNAN
BAGIAN PROVINSI DAN KABUPATEN/ KOTA
TAHUN ANGGARAN 2010**

dalam rupiah

NO	DAERAH	BIAYA PEMUNGUTAN PBB BAGIAN DAERAH
I	Provinsi Nanggroe Aceh Darussalam	5.732.821.114
1	Kab. Aceh Barat	398.511.176
2	Kab. Aceh Besar	503.690.854
3	Kab. Aceh Selatan	458.335.720
4	Kab. Aceh Singkil	365.256.996
5	Kab. Aceh Tengah	467.974.906
6	Kab. Aceh Tenggara	397.544.782
7	Kab. Aceh Timur	2.368.777.085
8	Kab. Aceh Utara	4.729.458.335
9	Kab. Bireuen	842.929.108
10	Kab. Aceh Pidie	370.393.379
11	Kab. Simeuleu	319.777.459
12	Kota Banda Aceh	550.951.573
13	Kota Sabang	430.300.477
14	Kota Langsa	538.520.955
15	Kota Lhokseumawe	1.385.759.013
16	Kab. Nagan Raya	475.638.300
17	Kab. Aceh Jaya	421.882.697
18	Kab. Aceh Barat Daya	403.796.502
19	Kab. Gayo Lues	491.994.358
20	Kab. Aceh Tamiang	2.030.532.327
21	Kab. Bener Meriah	382.709.307
22	Kab. Pidie Jaya	276.663.684
23	Kota Subulussalam	222.590.951
II	Provinsi Sumatera Utara	2.564.333.140
1	Kab. Asahan	2.050.611.603
2	Kab. Dairi	605.561.453
3	Kab. Deli Serdang	4.929.741.420
4	Kab. Karo	608.122.593
5	Kab. Labuhan Batu	1.722.286.975
6	Kab. Langkat	4.982.452.327
7	Kab. Mandailing Natal	968.177.555
8	Kab. Nias	127.790.223
9	Kab. Simalungun	2.548.753.388
10	Kab. Tapanuli Selatan	488.853.436

NO	DAERAH	BIAYA PEMUNGUTAN PBB BAGIAN DAERAH
11	Kab. Tapanuli Tengah	681.482.699
12	Kab. Tapanuli Utara	582.356.455
13	Kab. Toba Samosir	499.418.842
14	Kota Binjai	1.396.915.494
15	Kota Medan	14.615.833.516
16	Kota Pematang Siantar	611.907.610
17	Kota Sibolga	481.723.669
18	Kota Tanjung Balai	414.718.319
19	Kota Tebing Tinggi	537.449.130
20	Kota Padang Sidempuan	652.418.608
21	Kab. Pakpak Bharat	466.801.472
22	Kab. Nias Selatan	432.359.737
23	Kab. Humbang Hasundutan	667.738.975
24	Kab. Serdang Bedagai	1.771.908.368
25	Kab. Samosir	351.899.240
26	Kab. Batu Bara	862.462.149
27	Kab. Padang Lawas Utara	747.344.771
28	Kab. Padang Lawas	750.645.296
29	Kab. Labuhan Batu Selatan	1.647.626.484
30	Kab. Labuhan Batu Utara	1.133.597.186
31	Kab. Nias Utara	127.790.223
32	Kab. Nias Barat	127.790.223
33	Kota Gunung Sitoli	127.790.223
III	Provinsi Sumatera Barat	2.910.364.502
1	Kab. Limapuluh Kota	458.055.271
2	Kab. Agam	537.514.769
3	Kab. Kepulauan Mentawai	317.536.332
4	Kab. Padang Pariaman	531.143.037
5	Kab. Pasaman	365.846.180
6	Kab. Pesisir Selatan	547.646.912
7	Kab. Sijunjung	311.529.361
8	Kab. Solok	448.800.315
9	Kab. Tanah Datar	367.676.330
10	Kota Bukit Tinggi	304.428.056
11	Kota Padang Panjang	219.813.520
12	Kota Padang	2.030.220.072
13	Kota Payakumbuh	250.080.974
14	Kota Sawahlunto	224.643.448

NO	DAERAH	BIAYA PEMUNGUTAN PBB BAGIAN DAERAH
15	Kota Solok	250.912.522
16	Kota Pariaman	287.285.718
17	Kab. Pasaman Barat	680.384.134
18	Kab. Dharmasraya	451.178.785
19	Kab. Solok Selatan	412.141.353
IV	Provinsi Riau	9.068.266.926
1	Kab. Bengkalis	4.106.078.431
2	Kab. Indragiri Hilir	2.079.733.104
3	Kab. Indragiri Hulu	2.417.504.661
4	Kab. Kampar	4.222.975.419
5	Kab. Kuantan Singingi	1.055.533.915
6	Kab. Pelalawan	3.639.729.809
7	Kab. Rokan Hilir	5.181.041.367
8	Kab. Rokan Hulu	3.622.670.896
9	Kab. Siak	5.700.078.369
10	Kota Dumai	2.318.120.351
11	Kota Pekanbaru	4.146.050.928
12	Kab. Kepulauan Meranti	4.106.078.431
V	Provinsi Kepulauan Riau	4.109.047.183
1	Kab. Bintan	1.808.723.723
2	Kab. Natuna	4.904.292.346
3	Kab. Karimun	1.276.380.157
4	Kota Batam	5.136.635.914
5	Kota Tanjung Pinang	1.309.454.061
6	Kab. Lingga	810.847.751
7	Kab. Kepulauan Anambas	1.189.854.778
VI	Provinsi Jambi	5.629.725.604
1	Kab. Batanghari	2.390.486.680
2	Kab. Bungo	731.866.292
3	Kab. Kerinci	310.474.526
4	Kab. Merangin	916.173.777
5	Kab. Muaro Jambi	2.239.137.231
6	Kab. Sarolangun	1.445.142.153
7	Kab. Tanjung Jabung Barat	1.912.929.458
8	Kab. Tanjung Jabung Timur	2.344.148.495
9	Kab. Tebo	958.844.938
10	Kota Jambi	1.795.243.752
11	Kota Sungai Penuh	148.442.656
VII	Provinsi Sumatera Selatan	6.604.895.126
1	Kab. Lahat	2.523.966.622

NO	DAERAH	BIAYA PEMUNGUTAN PBB BAGIAN DAERAH
2	Kab. Musi Banyuasin	7.332.265.034
3	Kab. Musi Rawas	3.800.582.790
4	Kab. Muara Enim	4.650.972.611
5	Kab. Ogan Komering Ilir	1.452.118.434
6	Kab. Ogan Komering Ulu	2.082.005.470
7	Kota Palembang	5.321.089.949
8	Kota Pagar Alam	679.130.861
9	Kota Lubuk Linggau	619.560.306
10	Kota Prabumulih	1.470.824.555
11	Kab. Banyuasin	3.220.928.018
12	Kab. Ogan Ilir	2.026.716.881
13	Kab. OKU Timur	725.221.393
14	Kab. OKU Selatan	600.247.627
15	Kab. Empat Lawang	580.411.945
VIII	Provinsi Bangka Belitung	686.611.827
1	Kab. Bangka	694.958.471
2	Kab. Belitung	560.886.010
3	Kota Pangkal Pinang	647.458.986
4	Kab. Bangka Selatan	501.954.011
5	Kab. Bangka Tengah	524.310.148
6	Kab. Bangka Barat	584.826.660
7	Kab. Belitung Timur	498.642.326
IX	Provinsi Bengkulu	995.967.271
1	Kab. Bengkulu Selatan	358.578.942
2	Kab. Bengkulu Utara	462.979.181
3	Kab. Rejang Lebong	424.158.423
4	Kota Bengkulu	514.098.197
5	Kab. Kaur	458.462.987
6	Kab. Seluma	518.687.020
7	Kab. Mukomuko	645.866.172
8	Kab. Lebong	505.660.118
9	Kab. Kepahiang	413.387.442
10	Kab. Bengkulu Tengah	221.856.124
X	Provinsi Lampung	2.202.382.429
1	Kab. Lampung Barat	643.528.322
2	Kab. Lampung Selatan	1.219.054.068
3	Kab. Lampung Tengah	1.978.718.846
4	Kab. Lampung Utara	808.241.587
5	Kab. Lampung Timur	2.068.974.265
6	Kab. Tanggamus	473.844.041

NO	DAERAH	BIAYA PEMUNGUTAN PBB BAGIAN DAERAH
7	Kab. Tulang Bawang	424.675.772
8	Kab. Way Kanan	767.918.598
9	Kota Bandar Lampung	2.470.815.891
10	Kota Metro	484.443.775
11	Kab. Pesawaran	360.305.364
12	Kab. Pringsewu	473.844.041
13	Kab. Mesuji	424.675.772
14	Kab. Tulang Bawang Barat	424.675.772
XI	Provinsi DKI Jakarta	192.757.061.013
XII	Provinsi Jawa Barat	4.859.407.144
1	Kab. Bandung	5.646.808.851
2	Kab. Bekasi	17.478.040.178
3	Kab. Bogor	12.912.418.202
4	Kab. Ciamis	2.019.826.542
5	Kab. Cianjur	4.166.367.350
6	Kab. Cirebon	2.720.439.942
7	Kab. Garut	2.484.570.179
8	Kab. Indramayu	6.089.228.207
9	Kab. Karawang	11.299.153.805
10	Kab. Kuningan	1.574.218.705
11	Kab. Majalengka	2.700.809.770
12	Kab. Purwakarta	3.814.848.749
13	Kab. Subang	5.388.738.526
14	Kab. Sukabumi	3.742.313.094
15	Kab. Sumedang	1.979.944.779
16	Kab. Tasikmalaya	1.918.701.773
17	Kota Bandung	20.985.629.971
18	Kota Bekasi	10.457.920.311
19	Kota Bogor	4.736.671.370
20	Kota Cirebon	1.879.919.941
21	Kota Depok	7.181.691.922
22	Kota Sukabumi	780.645.285
23	Kota Cimahi	2.938.873.816
24	Kota Tasikmalaya	1.145.332.073
25	Kota Banjar	539.641.259
26	Kab. Bandung Barat	4.989.459.765
XIII	Provinsi Banten	3.297.615.531
1	Kab. Lebak	1.149.605.928
2	Kab. Pandeglang	1.057.847.888
3	Kab. Serang	2.530.756.491

NO	DAERAH	BIAYA PEMUNGUTAN PBB BAGIAN DAERAH
4	Kab. Tangerang	11.150.522.754
5	Kota Cilegon	4.038.903.653
6	Kota Tangerang	14.608.646.291
7	Kota Serang	886.001.770
8	Kota Tangerang Selatan	7.513.014.391
XIV	Provinsi Jawa Tengah	7.438.966.956
1	Kab. Banjarnegara	1.555.436.716
2	Kab. Banyumas	2.295.094.440
3	Kab. Batang	1.113.573.671
4	Kab. Blora	2.258.825.459
5	Kab. Boyolali	1.473.057.265
6	Kab. Brebes	2.205.538.219
7	Kab. Cilacap	3.424.191.996
8	Kab. Demak	1.551.322.520
9	Kab. Grobogan	2.022.780.210
10	Kab. Jepara	1.788.401.036
11	Kab. Karanganyar	1.904.908.678
12	Kab. Kebumen	1.606.732.037
13	Kab. Kendal	1.831.608.978
14	Kab. Klaten	1.714.122.007
15	Kab. Kudus	2.017.953.289
16	Kab. Magelang	1.802.020.090
17	Kab. Pati	1.744.850.999
18	Kab. Pekalongan	1.114.766.202
19	Kab. Pemasang	1.706.679.115
20	Kab. Purbalingga	1.288.659.650
21	Kab. Purworejo	1.374.851.257
22	Kab. Rembang	1.011.266.863
23	Kab. Semarang	1.949.212.767
24	Kab. Sragen	1.305.322.030
25	Kab. Sukoharjo	2.356.222.887
26	Kab. Tegal	2.096.993.010
27	Kab. Temanggung	1.125.915.050
28	Kab. Wonogiri	1.214.797.091
29	Kab. Wonosobo	1.309.495.754
30	Kota Magelang	409.177.985
31	Kota Pekalongan	674.739.509
32	Kota Salatiga	587.700.035
33	Kota Semarang	11.223.018.933
34	Kota Surakarta	2.772.125.481
35	Kota Tegal	907.769.130

NO	DAERAH	BIAYA PEMUNGUTAN PBB BAGIAN DAERAH
XV	Provinsi DI Yogyakarta	844.457.764
1	Kab. Bantul	1.486.530.264
2	Kab. Gunung Kidul	708.756.500
3	Kab. Kulon Progo	658.991.142
4	Kab. Sleman	3.658.260.126
5	Kota Yogyakarta	2.785.166.896
XVI	Provinsi Jawa Timur	11.583.308.319
1	Kab. Bangkalan	1.962.644.966
2	Kab. Banyuwangi	2.609.235.047
3	Kab. Blitar	1.858.221.524
4	Kab. Bojonegoro	3.271.072.005
5	Kab. Bondowoso	845.345.073
6	Kab. Gresik	5.613.399.999
7	Kab. Jember	3.136.281.544
8	Kab. Jombang	2.096.203.258
9	Kab. Kediri	3.016.654.343
10	Kab. Lamongan	2.453.349.184
11	Kab. Lumajang	1.375.392.050
12	Kab. Madiun	1.281.811.989
13	Kab. Magetan	1.175.577.189
14	Kab. Malang	3.707.208.407
15	Kab. Mojokerto	3.045.799.168
16	Kab. Nganjuk	1.904.869.719
17	Kab. Ngawi	1.475.318.268
18	Kab. Pacitan	786.740.771
19	Kab. Pamekasan	1.172.452.295
20	Kab. Pasuruan	3.669.288.345
21	Kab. Ponorogo	1.688.587.982
22	Kab. Probolinggo	1.904.132.641
23	Kab. Sampang	1.409.032.555
24	Kab. Sidoarjo	9.746.888.609
25	Kab. Situbondo	1.099.822.793
26	Kab. Sumenep	3.695.209.092
27	Kab. Trenggalek	1.137.481.025
28	Kab. Tuban	3.311.137.458
29	Kab. Tulungagung	1.951.939.679
30	Kota Blitar	467.734.305
31	Kota Kediri	1.160.575.797
32	Kota Madiun	755.647.652

NO	DAERAH	BIAYA PEMUNGUTAN PBB BAGIAN DAERAH
33	Kota Malang	2.829.554.565
34	Kota Mojokerto	508.712.168
35	Kota Pasuruan	475.333.202
36	Kota Probolinggo	851.447.628
37	Kota Surabaya	35.432.036.256
38	Kota Batu	776.338.723
XVII	Provinsi Kalimantan Barat	1.944.053.373
1	Kab. Bengkayang	599.531.041
2	Kab. Landak	907.920.329
3	Kab. Kapuas Hulu	1.150.889.594
4	Kab. Ketapang	1.110.516.655
5	Kab. Pontianak	504.906.987
6	Kab. Sambas	824.718.117
7	Kab. Sanggau	1.206.839.498
8	Kab. Sintang	1.000.412.510
9	Kota Pontianak	1.478.381.807
10	Kota Singkawang	498.638.831
11	Kab. Sekadau	599.364.643
12	Kab. Melawi	679.523.390
13	Kab. Kayong Utara	423.114.374
14	Kab. Kubu Raya	671.206.006
XVIII	Provinsi Kalimantan Tengah	4.749.172.478
1	Kab. Barito Selatan	1.181.513.753
2	Kab. Barito Utara	1.109.848.196
3	Kab. Kapuas	757.385.913
4	Kab. Kotawaringin Barat	679.094.935
5	Kab. Kotawaringin Timur	1.037.924.246
6	Kota Palangkaraya	542.880.797
7	Kab. Barito Timur	885.952.058
8	Kab. Murung Raya	1.065.066.771
9	Kab. Pulang Pisau	458.369.537
10	Kab. Gunung Mas	559.284.073
11	Kab. Lamandau	631.205.106
12	Kab. Sukamara	589.563.120
13	Kab. Katingan	626.782.996
14	Kab. Seruyan	956.530.943
XIX	Provinsi Kalimantan Selatan	2.931.060.045
1	Kab. Banjar	963.686.352
2	Kab. Barito Kuala	518.867.327
3	Kab. Hulu Sungai Selatan	526.770.914

NO	DAERAH	BIAYA PEMUNGUTAN PBB BAGIAN DAERAH
4	Kab. Hulu Sungai Tengah	512.860.449
5	Kab. Hulu Sungai Utara	841.466.682
6	Kab. Kota Baru	984.270.478
7	Kab. Tabalong	2.178.002.850
8	Kab. Tanah Laut	780.588.480
9	Kab. Tapin	641.530.695
10	Kota Banjar Baru	637.328.117
11	Kota Banjarmasin	1.242.419.027
12	Kab. Balangan	1.108.183.071
13	Kab. Tanah Bumbu	788.265.735
XX	Provinsi Kalimantan Timur	9.825.995.848
1	Kab. Berau	1.376.656.752
2	Kab. Bulungan	2.648.530.027
3	Kab. Kutai Kartanegara	17.656.108.809
4	Kab. Kutai Barat	1.645.332.162
5	Kab. Kutai Timur	4.460.152.220
6	Kab. Malinau	1.467.105.176
7	Kab. Nunukan	3.185.691.750
8	Kab. Paser	1.517.680.579
9	Kota Balikpapan	4.989.608.478
10	Kota Bontang	3.397.778.152
11	Kota Samarinda	4.315.051.721
12	Kota Tarakan	4.168.556.981
13	Kab. Penajam Paser Utara	3.130.571.232
14	Kab. Tana Tidung	774.075.395
XXI	Provinsi Sulawesi Utara	1.288.402.494
1	Kab. Bolaang Mongondow	318.110.311
2	Kab. Minahasa	593.201.481
3	Kab. Sangihe	249.033.513
4	Kota Bitung	710.527.199
5	Kota Manado	1.403.531.782
6	Kab. Kepulauan Talaud	407.538.525
7	Kab. Minahasa Selatan	417.086.428
8	Kota Tomohon	412.574.240
9	Kab. Minahasa Utara	485.476.092
10	Kota Kotamobagu	285.146.241
11	Kab. Bolaang Mongondow Utara	255.633.285
12	Kab. Kep. Siau Tagulandang Biaro	185.830.446
13	Kab. Minahasa Tenggara	257.915.261
14	Kab. Bolaang Mongondow Timur	141.735.456
15	Kab. Bolaang Mongondow Selatan	117.124.576

NO	DAERAH	BIAYA PEMUNGUTAN PBB BAGIAN DAERAH
XXII	Provinsi Gorontalo	564.788.959
1	Kab. Boalemo	382.122.312
2	Kab. Gorontalo	361.094.259
3	Kota Gorontalo	399.110.207
4	Kab. Pohuwato	400.847.837
5	Kab. Bone Bolango	435.428.046
6	Kab. Gorontalo Utara	269.242.681
XXIII	Provinsi Sulawesi Tengah	1.448.149.688
1	Kab. Banggai	833.218.699
2	Kab. Banggai Kepulauan	529.805.826
3	Kab. Buol	477.681.667
4	Kab. Toli-Toli	555.007.552
5	Kab. Donggala	568.433.119
6	Kab. Morowali	1.186.413.535
7	Kab. Poso	665.113.243
8	Kota Palu	613.136.808
9	Kab. Parigi Moutong	786.730.330
10	Kab. Tojo Una Una	533.373.988
11	Kab. Sigi	361.977.217
XXIV	Provinsi Sulawesi Selatan	2.112.893.309
1	Kab. Bantaeng	664.860.168
2	Kab. Barru	542.155.649
3	Kab. Bone	1.597.445.597
4	Kab. Bulukumba	999.971.574
5	Kab. Enrekang	749.593.408
6	Kab. G o w a	953.151.305
7	Kab. Jeneponto	719.781.565
8	Kab. Luwu	701.359.856
9	Kab. Luwu Utara	992.198.231
10	Kab. M a r o s	854.446.640
11	Kab. Pangkajene Kepulauan	677.003.862
12	Kab. Pinrang	982.984.753
13	Kab. Selayar	578.004.864
14	Kab. Sidenreng Rappang	1.095.669.739
15	Kab. Sinjai	675.776.423
16	Kab. Soppeng	783.769.553
17	Kab. Takalar	648.033.121

NO	DAERAH	BIAYA PEMUNGUTAN PBB BAGIAN DAERAH
18	Kab. Tana Toraja	390.389.823
19	Kab. Wajo	2.352.685.755
20	Kota Pare-pare	440.570.117
21	Kota Makassar	4.831.861.571
22	Kota Palopo	404.211.074
23	Kab. Luwu Timur	613.801.155
24	Kab. Toraja Utara	344.976.720
XXV	Provinsi Sulawesi Barat	312.972.946
1	Kab. Majene	601.448.858
2	Kab. Mamuju	872.650.052
3	Kab. Polewali Mandar	727.414.856
4	Kab. Mamasa	490.146.448
5	Kab. Mamuju Utara	947.916.923
XXVI	Provinsi Sulawesi Tenggara	641.467.892
1	Kab. Buton	516.873.593
2	Kab. Konawe	510.960.080
3	Kab. Kolaka	904.468.405
4	Kab. Muna	434.023.093
5	Kota Kendari	655.284.039
6	Kota Bau-bau	589.920.015
7	Kab. Konawe Selatan	689.644.968
8	Kab. Bombana	493.626.591
9	Kab. Wakatobi	407.483.815
10	Kab. Kolaka Utara	529.357.519
11	Kab. Konawe Utara	406.616.004
12	Kab. Buton Utara	191.889.823
XXVII	Provinsi Bali	1.351.514.013
1	Kab. Badung	6.216.376.091
2	Kab. Bangli	468.958.161
3	Kab. Buleleng	923.432.354
4	Kab. Gianyar	859.644.991
5	Kab. Jembrana	694.619.018
6	Kab. Karangasem	579.621.828
7	Kab. Klungkung	420.040.464
8	Kab. Tabanan	1.136.623.413
9	Kota Denpasar	5.411.219.407
XXVIII	Provinsi Nusa Tenggara Barat	925.849.959
1	Kab. Bima	509.099.318
2	Kab. Dompu	404.847.387
3	Kab. Lombok Barat	749.278.761

NO	DAERAH	BIAYA PEMUNGUTAN PBB BAGIAN DAERAH
4	Kab. Lombok Tengah	976.165.334
5	Kab. Lombok Timur	1.046.674.390
6	Kab. Sumbawa	813.044.576
7	Kota Mataram	996.403.453
8	Kota Bima	369.165.929
9	Kab. Sumbawa Barat	586.888.286
10	Kab. Lombok Utara	353.397.964
XXIX	Provinsi Nusa Tenggara Timur	1.257.448.773
1	Kab. Alor	379.660.721
2	Kab. Belu	502.881.965
3	Kab. Ende	419.207.528
4	Kab. Flores Timur	478.998.171
5	Kab. Kupang	268.299.949
6	Kab. Lembata	322.932.852
7	Kab. Manggarai	276.836.354
8	Kab. Ngada	233.222.420
9	Kab. Sikka	450.510.913
10	Kab. Sumba Barat	197.635.829
11	Kab. Sumba Timur	580.125.695
12	Kab. Timor Tengah Selatan	551.485.470
13	Kab. Timor Tengah Utara	486.737.314
14	Kota Kupang	555.486.350
15	Kab. Rote Ndao	390.325.035
16	Kab. Manggarai Barat	344.439.280
17	Kab. Nagekeo	255.965.708
18	Kab. Sumba Barat Daya	313.065.964
19	Kab. Sumba Tengah	226.743.520
20	Kab. Manggarai Timur	241.755.000
21	Kab. Sabu Raijua	268.299.949
XXX	Provinsi Maluku	2.026.420.306
1	Kab. Maluku Tenggara Barat	428.042.186
2	Kab. Maluku Tengah	1.090.507.880
3	Kab. Maluku Tenggara	486.928.425
4	Kab. Pulau Buru	404.231.652
5	Kota Ambon	855.076.822
6	Kab. Seram Bagian Barat	571.712.748
7	Kab. Seram Bagian Timur	1.617.775.838
8	Kab. Kepulauan Aru	490.105.073
9	Kota Tual	209.725.480

NO	DAERAH	BIAYA PEMUNGUTAN PBB BAGIAN DAERAH
10	Kab. Maluku Barat Daya	354.704.893
11	Kab. Buru Selatan	226.261.557
XXXI	Provinsi Maluku Utara	713.172.441
1	Kab. Halmahera Tengah	812.148.714
2	Kab. Halmahera Barat	808.125.874
3	Kota Ternate	975.953.270
4	Kab. Halmahera Timur	941.840.772
5	Kota Tidore Kepulauan	671.398.415
6	Kab. Kepulauan Sula	719.475.899
7	Kab. Halmahera Selatan	924.455.536
8	Kab. Halmahera Utara	397.247.597
9	Kab. Pulau Morotai	397.247.597
XXXII	Provinsi Papua	5.722.705.103
1	Kab. Biak Numfor	548.042.982
2	Kab. Jayapura	967.466.866
3	Kab. Jayawijaya	520.718.779
4	Kab. Merauke	1.230.756.146
5	Kab. Mimika	4.111.560.355
6	Kab. Nabire	557.028.908
7	Kab. Paniai	408.410.177
8	Kab. Puncak Jaya	573.411.815
9	Kab. Kepulauan Yapen	737.814.189
10	Kota Jayapura	846.467.608
11	Kab. Sarmi	822.693.998
12	Kab. Keerom	715.756.742
13	Kab. Yahukimo	781.094.484
14	Kab. Pegunungan Bintang	868.966.172
15	Kab. Tolikara	689.988.020
16	Kab. Boven Digoel	1.041.803.255
17	Kab. Mappi	901.945.139
18	Kab. Asmat	786.616.376
19	Kab. Waropen	1.029.358.630
20	Kab. Supiori	395.447.659
21	Kab. Mamberamo Raya	505.103.537
22	Kab. Mamberamo Tengah	114.396.463
23	Kab. Yalimo	118.100.922
24	Kab. Lanny Jaya	172.896.035
25	Kab. Nduga	144.951.568
26	Kab. Puncak	312.071.341
27	Kab. Dogiyai	261.379.833

NO	DAERAH	BIAYA PEMUNGUTAN PBB BAGIAN DAERAH
28	Kab. Intan Jaya	408.410.177
29	Kab. Deiyai	408.410.177
XXXIII	Provinsi Papua Barat	2.558.146.900
1	Kab. Sorong	1.710.615.723
2	Kab. Manokwari	3.071.853.343
3	Kab. Fak Fak	1.629.294.078
4	Kota Sorong	1.743.633.737
5	Kab. Sorong Selatan	2.104.059.012
6	Kab. Raja Ampat	2.280.139.175
7	Kab. Teluk Bintuni	5.726.259.405
8	Kab. Teluk Wondama	910.599.621
9	Kab. Kaimana	1.459.743.541
10	Kab. Tambrau	1.710.615.723
11	Kab. Maybrat	1.710.615.723
	Total	1.115.326.349.738

MENTERI KEUANGAN
REPUBLIK INDONESIA,

SRI MULYANI INDRAWATI